

TESIS
SENGKETA KEPEGAWAIAN SEKRETARIS
DAERAH TERHADAP BUPATI KABUPATEN
BANJAR (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA NOMOR
34/G/TF/2024/PTUN.BJM)



Diajukan oleh

MUHAMMAD SYAIFUL

NIM. 2420215310030

PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN

2026

**SENGKETA KEPEGAWAIAN SEKRETARIS DAERAH
TERHADAP BUPATI KABUPATEN BANJAR (ANALISIS
PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
NOMOR 34/G/TF/2024/PTUN.BJM)**

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

oleh

**MUHAMMAD SYAIFUL
NIM. 2420215310030**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

Judul Tesis : Sengketa Kepegawaian Sekretaris Daerah Terhadap Bupati
Kabupaten Banjar (Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Nomor 34/G/TF/2024/PTUN.BJM)

Nama : Muhammad Syaiful

NIM : 2420215310030

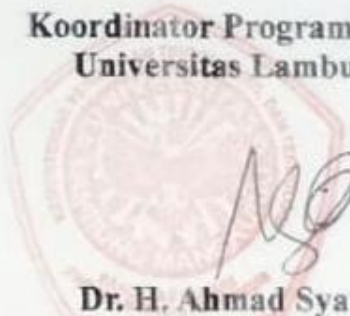
Disetujui,
Komisi Pembimbing
Pembimbing



Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.
NIP. 19800303 200501 2 003

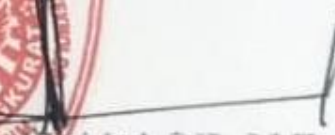
Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat




Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

Tesis Ini
Telah Diperiksa Dan Disetujui
Pada Tanggal 30 Juni 2026

Pembimbing



Dr. Lies Ariany, S.H, M.H.
NIP. 19800303 200501 2 003

Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

Tesis ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 30 Juni 2026

SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Deden Koswara, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Lies Ariany, S.H, M.H. (Pembimbing)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Syaiful

NIM : 2420215310030

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiasme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 22 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



MUHAMMAD SYAIFUL

NIM. 2420215310030

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Semua akan berlalu”

Karya Sederhana ini penulis persembahkan kepada:

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, serta karunia-Nya, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

Karya sederhana ini saya persembahkan dengan penuh rasa hormat dan cinta kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ibrahim dan Ibu Sutina yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, pengorbanan, nasihat, dan dukungan tanpa batas. Terima kasih atas setiap perjuangan, ketulusan, dan pengorbanan yang telah menjadi kekuatan terbesar dalam perjalanan hidup dan pendidikan yang saya tempuh.
2. Mertua Tercinta, H. Zainul Arifin dan Hj. Norita Sarmawati Terima kasih atas doa, dukungan, perhatian, dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis sebagai bagian dari keluarga. Kehangatan dan kepercayaan yang diberikan menjadi salah satu kekuatan yang mengiringi perjalanan akademik ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada Abah dan Mama.
3. Istri tercinta, Rania Salwa Kurniaty yang selalu menjadi sumber semangat, kebahagiaan, dan motivasi untuk terus berjuang menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih atas kesabaran, pengertian, dan doa yang selalu menyertai setiap proses yang dilalui.
4. Keluarga besar tercinta, yang senantiasa memberikan dukungan, perhatian, serta doa sehingga saya mampu menyelesaikan studi ini dengan baik.
5. Para dosen pembimbing, dosen penguji, dan seluruh civitas akademika Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah membimbing, mendidik, dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama proses perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.
6. Sahabat dan rekan seperjuangan, yang telah menemani perjalanan akademik ini, saling menguatkan, berbagi pengalaman, dan memberikan semangat dalam menghadapi setiap tantangan.
7. Almamater tercinta, Program Magister Hukum Fakultas Hukum ULM Banjarmasin, yang telah menjadi tempat bertumbuh, belajar, dan mengembangkan kemampuan akademik

Semoga karya ini dapat menjadi bagian kecil dari kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum serta memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

MUHAMMAD SYAIFUL. 2026. SENGKETA KEPEGAWAIAN SEKRETARIS DAERAH TERHADAP BUPATI KABUPATEN BANJAR (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 34/G/TF/2024/PTUN.BJM). Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Lies Ariany, S.H., M.H. 109 Halaman

RINGKASAN

Penelitian ini berjudul “Sengketa Kepegawaian Sekretaris Daerah terhadap Bupati Kabupaten Banjar (Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 34/G/TF/2024/PTUN.BJM).” Penelitian dilatarbelakangi oleh sengketa kepegawaian antara Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar dengan Bupati Kabupaten Banjar terkait pemberian predikat kinerja “Sangat Kurang” melalui aplikasi E-Kinerja. Penilaian tersebut dipersoalkan karena diduga dilakukan tanpa memenuhi prosedur penilaian kinerja ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022. Selain itu, penilaian tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip sistem merit dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) apakah tindakan Bupati yang menjadi objek sengketa dalam Putusan PTUN Nomor 34/G/TF/2024/PTUN.BJM telah memenuhi AUPB sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; dan (2) apakah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan tersebut telah memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap hak jabatan Sekretaris Daerah sebagai Aparatur Sipil Negara.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan Putusan PTUN Nomor 34/G/TF/2024/PTUN.BJM, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori kewenangan, teori Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan teori perlindungan hukum ASN.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Bupati dalam melakukan penilaian kinerja terhadap Sekretaris Daerah tidak memenuhi AUPB. Secara prosedural, tindakan tersebut melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan karena tidak didahului monitoring kinerja, dialog kinerja, coaching, pemberian umpan balik, pembentukan Tim Penilai Kinerja, serta dokumen penilaian tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Secara substantif, tindakan tersebut juga bertentangan dengan asas ketidakberpihakan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dan asas keterbukaan karena pemberian nilai “Sangat Kurang” tidak

didasarkan pada data objektif capaian kinerja organisasi serta tidak mencerminkan prinsip sistem merit.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada dasarnya telah memberikan perlindungan hukum yang cukup terhadap Sekretaris Daerah sebagai ASN melalui pembatalan tindakan Bupati dan perintah untuk melakukan penilaian ulang sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, putusan tersebut belum sepenuhnya komprehensif karena belum memberikan penegasan mengenai status hukum dokumen penilaian yang tidak ditandatangani, belum menentukan secara jelas apakah tindakan tersebut batal demi hukum atau hanya dapat dibatalkan, serta belum menguraikan secara mendalam hubungan antara kinerja organisasi dan kinerja individu Sekretaris Daerah.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan PTUN Nomor 34/G/TF/2024/PTUN.BJM merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap ASN dari tindakan kepegawaian yang tidak objektif dan tidak sesuai prosedur. Putusan tersebut sekaligus mempertegas pentingnya penerapan AUPB, sistem merit, dan pembatasan kewenangan pejabat pembina kepegawaian dalam pengelolaan aparatur sipil negara guna menjamin kepastian hukum, profesionalitas birokrasi, dan perlindungan hak jabatan ASN.

MUHAMMAD SYAIFUL. 2026. Sengketa Kepegawaian Sekretaris Daerah Terhadap Bupati Kabupaten Banjar (Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 34/G/TF/2024/PTUN.BJM). Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Lies Ariany, S.H., M.H. 109 Halaman

ABSTRAK

Kata Kunci: Sengketa Kepegawaian, Sekretaris Daerah, Bupati, AUPB, Perlindungan Hukum ASN, PTUN.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sengketa kepegawaian antara Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar dan Bupati Banjar terkait penilaian kinerja dengan predikat “Sangat Kurang” yang diberikan kepada Sekretaris Daerah melalui sistem E-Kinerja. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) apakah tindakan Bupati yang menjadi objek sengketa telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; dan (2) apakah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan PTUN Nomor 34/G/TF/2024/PTUN.BJM telah memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap hak jabatan Sekretaris Daerah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori kewenangan, teori Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan teori perlindungan hukum ASN.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Bupati dalam melakukan penilaian kinerja terhadap Sekretaris Daerah tidak memenuhi prinsip-prinsip AUPB, khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas keterbukaan, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Penilaian kinerja dilakukan tanpa melalui tahapan pemantauan kinerja, pembinaan, dialog kinerja, dan pemberian umpan balik sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022. Selain itu, dokumen penilaian tidak ditandatangani oleh pejabat penilai dan tidak dilaporkan kepada Tim Penilai Kinerja. Penelitian ini juga menemukan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada dasarnya telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi Sekretaris Daerah sebagai ASN melalui pembatalan tindakan pemerintahan yang cacat prosedur dan substansi, serta perintah untuk melakukan penilaian ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Putusan tersebut memperkuat penerapan sistem merit, membatasi potensi penyalahgunaan kewenangan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, serta memberikan jaminan perlindungan terhadap hak jabatan ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Muhammad Syaiful. *Employment Dispute Between the Regional Secretary and the Regent of Banjar Regency (An Analysis of the Administrative Court Decision Number 34/G/TF/2024/PTUN.BJM)*. Master's Thesis, Master of Law Program, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University, 2026. Supervisor by Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.

ABSTRACT

Keywords: *Employment Dispute, Regional Secretary, Regent, General Principles of Good Governance, Civil Servant Legal Protection, Administrative Court.*

This study was motivated by an employment dispute between the Regional Secretary of Banjar Regency and the Regent of Banjar concerning a performance evaluation that resulted in a “Very Poor” performance rating assigned to the Regional Secretary through the E-Kinerja system. The issues examined in this study are: (1) whether the Regent’s action, which became the object of dispute, complied with the General Principles of Good Governance (AUPB) as stipulated in Article 10 of Law Number 30 of 2014 on Government Administration; and (2) whether the legal reasoning of the panel of judges in Administrative Court Decision Number 34/G/TF/2024/PTUN.BJM provided adequate legal protection for the position rights of the Regional Secretary as a Civil Servant (ASN).

This research is a normative legal study employing statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The analytical frameworks applied in this study are the theory of authority, the theory of the General Principles of Good Governance (AUPB), and the theory of legal protection for civil servants.

The findings reveal that the Regent’s performance evaluation of the Regional Secretary did not comply with the principles of AUPB, particularly the principles of legal certainty, prudence, transparency, and prohibition of abuse of authority. The performance assessment was conducted without performance monitoring, coaching, performance dialogue, and feedback mechanisms as required by Government Regulation Number 30 of 2019 and Minister of Administrative and Bureaucratic Reform Regulation Number 6 of 2022. Furthermore, the evaluation document was not signed by the authorized evaluator and was not submitted to the Performance Evaluation Team. The study also concludes that the judges’ legal reasoning generally provided adequate legal protection for the Regional Secretary as a civil servant by annulling the administrative action that was procedurally and substantively defective and ordering a reassessment in accordance with applicable laws and regulations. The decision strengthens the implementation of the merit system, limits the potential abuse of authority by Personnel Development Officers, and ensures legal protection for the position rights of civil servants within regional government administration.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas berkat dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“SENGKETA KEPEGAWAIAN SEKRETARIS DAERAH TERHADAP BUPATI KABUPATEN BANJAR (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 34/G/TF/2024/PTUN.BJM)”**.

Tujuan penulisan tesis ini untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) bagi mahasiswa program S-2 di program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih banyak terdapat kekurangan, baik dalam hal isi, substansi materi penjelasan, bahasa, maupun tutur penulisan yang tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Terselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada yang penulis hormati:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Dr. H. Achmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Sekaligus selaku dosen pembimbing akademik.
3. Ibu Dr. Lies Ariany, S.H, M.H. selaku dosen pembimbing dalam penulisan tesis penulis yang telah memberikan waktunya serta kritik dan saran bimbingan maupun arahan yang membangun dalam penyusunan tesis ini.
4. Bapak Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D dan Dr. Deden Koswara, S.H., M.H yang menjadi Tim Penguji Ujian Tesis penulis
5. Serta Bapak/Ibu Dosen pengajar di Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

6. Orangtua Penulis yang tercinta, untuk Mama Sutina, Abah Ibrahim, Mama Mertua Hj. Norita Sarmawati, Abah Mertua H. Zainul Arifin yang terus mendukung, memberikan perhatian, wejangan, kasih sayang, dan kepercayaan kepada Penulis untuk menimba ilmu sehingga tesis ini selesai.
7. Teristimewa kepada Istri yang penulis cintai, Rania Salwa Kurniaty yang tidak pernah lelah memberikan perhatian, cinta, kasih sayang, saran dan selalu memberikan dukungan moril dan materil untuk penulis sehingga segalanya menjadi lebih mudah untuk dilewati.
8. Keluarga besar tercinta, yang senantiasa memberikan dukungan, perhatian, serta doa sehingga saya mampu menyelesaikan studi ini dengan baik.
9. Sahabat dan rekan seperjuangan, yang telah menemani perjalanan akademik ini, saling menguatkan, berbagi pengalaman, dan memberikan semangat dalam menghadapi setiap tantangan.
10. Serta teman-teman dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan motivasi sehingga Penulis optimis dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II PUTUSAN PTUN NOMOR 34/G/TF/2024/PTUN.BJM.....	17
A. Anotasi Putusan PTUN Nomor 34/G/TF/2024/PTUN.BJM.....	17
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORITIS SENGKETA KEPEGAWAIAN SEKRETARIS DAERAH TERHADAP BUPATI KABUPATEN BANJAR: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 34/G/TF/2024/PTUN.BJM	27
A. Teori Kewenangan	27
B. Teori Asas Umum Pemerintahan yang Baik	34

C. Teori Perlindungan ASN	45
BAB IV PEMBAHASAN.....	49
A. Tindakan Bupati Dalam Penilaian Kinerja Sekretaris Daerah Ditinjau Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 10 Uu No. 30 Tahun 2014	49
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Jabatan Sekretaris Daerah.....	95
BAB V PENUTUP.....	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	